

**LAPORAN KEGIATAN
PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**



**Monografi Desa Larik Kemahan Kecamatan Hamparan Rawang
Kabupaten Kerinci**

OLEH :

**Silvia Rahayu, S.P.,M.Si.
1013108602**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SAKTI ALAM KERINCI KOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Monografi Desa Larik Kemahan Kecamatan Hamparan Rawang Kabupaten Kerinci
2. Lokasi : Desa Larik Kemahan, Kecamatan Hamparan Rawang
3. Pengabdian :
 - a. Nama Lengkap : Silvia Rahayu, S.P.,M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIDN : 1013108602
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - f. No Hp : 0812-7479-836
 - g. Alamat kantor : Jalan Jenderal Sudirman No.89 Kota Sungai Penuh
4. Biaya : Rp.6.000.000,-
5. Tahun Pelaksanaan : 2021

Ketua PPM
STIE Sakti Alam Kerinci
Dede Pramurza, S.E., M.Ak
NIDN.1004058001

Sungai Penuh, Juli 2021
Pengabdian,

Silvia Rahayu, S.P.,M.Si.
NIDN. 1013108602

Mengetahui
Ketua STIE Sakti Alam Kerinci

Gampo Haryono, S.E.,M.M.
NIDN. 1013108602

MONOGRAFI DESA

Monografi Desa adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

• Monografi Desa memuat antara lain:

- Data Umum
- Data Personil
- Data Kewenangan
- Data Keuangan, dan
- Data Kelembagaan

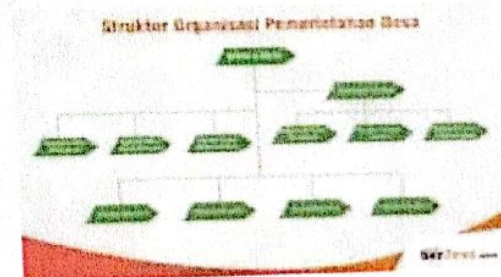
DATA UMUM

Data umum berisi antara lain data sosial, ekonomi, ketentraman dan ketertiban, dan bencana serta kewilayahan.

A. Data Umum 1. Jumlah penduduk 2. Jumlah rumah 3. Jumlah lahan pertanian 4. Jumlah lahan perikanan 5. Jumlah lahan peternakan 6. Jumlah lahan perkebunan 7. Jumlah lahan pertambangan 8. Jumlah lahan perindustrian 9. Jumlah lahan perdagangan 10. Jumlah lahan perhotelan 11. Jumlah lahan perrekreasi 12. Jumlah lahan perbudaya 13. Jumlah lahan perkepariwisataan 14. Jumlah lahan perkegiatan sosial 15. Jumlah lahan perkegiatan ekonomi 16. Jumlah lahan perkegiatan politik 17. Jumlah lahan perkegiatan agama 18. Jumlah lahan perkegiatan seni 19. Jumlah lahan perkegiatan olahraga 20. Jumlah lahan perkegiatan lainnya	B. Data Personil 1. Jumlah penduduk 2. Jumlah rumah 3. Jumlah lahan pertanian 4. Jumlah lahan perikanan 5. Jumlah lahan peternakan 6. Jumlah lahan perkebunan 7. Jumlah lahan pertambangan 8. Jumlah lahan perindustrian 9. Jumlah lahan perdagangan 10. Jumlah lahan perhotelan 11. Jumlah lahan perrekreasi 12. Jumlah lahan perbudaya 13. Jumlah lahan perkepariwisataan 14. Jumlah lahan perkegiatan sosial 15. Jumlah lahan perkegiatan ekonomi 16. Jumlah lahan perkegiatan politik 17. Jumlah lahan perkegiatan agama 18. Jumlah lahan perkegiatan seni 19. Jumlah lahan perkegiatan olahraga 20. Jumlah lahan perkegiatan lainnya
---	---

DATA PERSONIL

Data personil berisi antara lain data personil penyelenggara pemerintahan desa.



DATA KEWENANGAN

Data kewenangan berisi antara lain data kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, data kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan desa meliputi:

- 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2. Pelaksanaan pembangunan desa.
- 3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- 4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- 5. Pelaksanaan pengelolaan aset desa.
- 6. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup desa.
- 7. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia desa.
- 8. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam desa.
- 9. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya budaya desa.
- 10. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya informasi desa.
- 11. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya teknologi desa.
- 12. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya energi desa.
- 13. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan desa.
- 14. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pendidikan desa.
- 15. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya olahraga dan rekreasi desa.
- 16. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya seni dan budaya desa.
- 17. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pariwisata desa.
- 18. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya transportasi desa.
- 19. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi desa.
- 20. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya keamanan dan ketertahanan desa.
- 21. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pertahanan desa.
- 22. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup desa.
- 23. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya bencana desa.
- 24. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya energi desa.
- 25. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan desa.
- 26. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pendidikan desa.
- 27. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya olahraga dan rekreasi desa.
- 28. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya seni dan budaya desa.
- 29. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pariwisata desa.
- 30. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya transportasi desa.
- 31. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi desa.
- 32. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya keamanan dan ketertahanan desa.
- 33. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pertahanan desa.
- 34. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup desa.
- 35. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya bencana desa.
- 36. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya energi desa.
- 37. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan desa.
- 38. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pendidikan desa.
- 39. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya olahraga dan rekreasi desa.
- 40. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya seni dan budaya desa.
- 41. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pariwisata desa.
- 42. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya transportasi desa.
- 43. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi desa.
- 44. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya keamanan dan ketertahanan desa.
- 45. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pertahanan desa.
- 46. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup desa.
- 47. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya bencana desa.
- 48. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya energi desa.
- 49. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan desa.
- 50. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pendidikan desa.
- 51. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya olahraga dan rekreasi desa.
- 52. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya seni dan budaya desa.
- 53. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pariwisata desa.
- 54. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya transportasi desa.
- 55. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi desa.
- 56. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya keamanan dan ketertahanan desa.
- 57. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pertahanan desa.
- 58. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup desa.
- 59. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya bencana desa.
- 60. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya energi desa.
- 61. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan desa.
- 62. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pendidikan desa.
- 63. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya olahraga dan rekreasi desa.
- 64. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya seni dan budaya desa.
- 65. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pariwisata desa.
- 66. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya transportasi desa.
- 67. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi desa.
- 68. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya keamanan dan ketertahanan desa.
- 69. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pertahanan desa.
- 70. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup desa.
- 71. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya bencana desa.
- 72. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya energi desa.
- 73. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan desa.
- 74. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pendidikan desa.
- 75. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya olahraga dan rekreasi desa.
- 76. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya seni dan budaya desa.
- 77. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pariwisata desa.
- 78. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya transportasi desa.
- 79. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi desa.
- 80. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya keamanan dan ketertahanan desa.
- 81. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pertahanan desa.
- 82. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup desa.
- 83. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya bencana desa.
- 84. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya energi desa.
- 85. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan desa.
- 86. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pendidikan desa.
- 87. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya olahraga dan rekreasi desa.
- 88. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya seni dan budaya desa.
- 89. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pariwisata desa.
- 90. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya transportasi desa.
- 91. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi desa.
- 92. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya keamanan dan ketertahanan desa.
- 93. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pertahanan desa.
- 94. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup desa.
- 95. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya bencana desa.
- 96. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya energi desa.
- 97. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan desa.
- 98. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya pendidikan desa.
- 99. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya olahraga dan rekreasi desa.
- 100. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya seni dan budaya desa.

DATA KEUANGAN DESA

Data Keuangan Desa berisi antara lain data pendapatan, belanja, pembiayaan dan kekayaan desa.

APBDESA

1. Pendapatan	2. Belanja	3. Pembiayaan
1.1 Pajak 1.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan 1.1.2 Pajak Perdagangan 1.1.3 Pajak Pertambahan Nilai 1.1.4 Pajak Penghasilan 1.1.5 Pajak Lain-lain	2.1 Belanja Pegawai 2.1.1 Gaji dan Upah 2.1.2 Tunjangan 2.1.3 Biaya Perjalanan Dinas 2.1.4 Biaya Lain-lain	3.1 Pinjaman 3.1.1 Pinjaman 3.1.2 Pinjaman 3.1.3 Pinjaman 3.1.4 Pinjaman 3.1.5 Pinjaman
1.2 Lain-lain 1.2.1 Lain-lain 1.2.2 Lain-lain 1.2.3 Lain-lain 1.2.4 Lain-lain 1.2.5 Lain-lain	2.2 Belanja Barang 2.2.1 Belanja Barang 2.2.2 Belanja Barang 2.2.3 Belanja Barang 2.2.4 Belanja Barang 2.2.5 Belanja Barang	3.2 Hibah 3.2.1 Hibah 3.2.2 Hibah 3.2.3 Hibah 3.2.4 Hibah 3.2.5 Hibah
1.3 Lain-lain 1.3.1 Lain-lain 1.3.2 Lain-lain 1.3.3 Lain-lain 1.3.4 Lain-lain 1.3.5 Lain-lain	2.3 Belanja Modal 2.3.1 Belanja Modal 2.3.2 Belanja Modal 2.3.3 Belanja Modal 2.3.4 Belanja Modal 2.3.5 Belanja Modal	3.3 Penghasilan 3.3.1 Penghasilan 3.3.2 Penghasilan 3.3.3 Penghasilan 3.3.4 Penghasilan 3.3.5 Penghasilan

DATA KELEMBAGAAN

Data Kelembagaan berisi antara lain data kelembagaan desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo pada 9 April 2018 ini diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 18 Nomor 569 tanggal 27 April 2018 di Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan dinyatakan tidak berlaku.

Manfaat Monografi Desa

1. Memperoleh data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat secara sistematis, lengkap, akurat dan terpadu.
2. Memudahkan pengelolaan data dan informasi yang siap disampaikan kepada pemerintah di tingkat atas desa dan kelurahan.
3. Memfungsikan desa dan kelurahan dalam kedudukannya sebagai sumber data informasi dalam penetapan kebijakan pemerintah.

Metode Pengembangan sistem manajemen monografi menggunakan model proses waterfall. Tahapannya dimulai dari tahapan perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi dan perawatan secara berurutan

Sistem manajemen data monografi yang menggunakan teknologi yang terkomputerisasi dalam sebuah database akan memberikan kontribusi kepada kelurahan maupun instansi yang terkait dalam manajemen data monografi dengan membangun sistem informasi yang disertai dengan DBMS (Database management system) sebagai pengarsipan serta pengelolaan data. Data disimpan dalam bentuk database, sehingga mempunyai efisiensi dan integritas yang tinggi. Pengembangan dan perubahan sistem dapat dilakukan dengan mudah dan terpusat pada sisi server. Sedangkan program aplikasi tidak perlu di install dan didistribusikan kepada setiap client atau web browser.

ABSEN PERTEMUAN

monografi data

Selasa

24. msi 2019

Tema
Hari
Tanggal

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	ALIRARDI		1 au
2	ANNA HENDRA		2 AH
3	VIVARADIS		3 VV
4	MARLE		4 MM
5	ANVENUS		5 AN
6	MARJUN		6 MA
7	ASRIC		7 AS
8	ERIARYADI		8 ER
9	HAIRYANI NORAI		9 HN
10	ADIT Setawan		10 AD
11	VEPY EMOYATETI		11 VE
12	IKHWAN		12 IK
13	LAMBA ASIRAN		13 LA
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			
37			
38			

Dokumentasi

